

# AKIBAT HUKUM PADA PROSES ROYA TERHADAP BANK YANG MELAKUKAN CORPORATE ACTION

Oleh:

Dita Ayu Mandiri

Noor Fatimah Mediawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Desember, 2022



# Pendahuluan

- Mayoritas kebangkrutan dari lembaga perbankan terjadi karena kasus pengkreditan yang macet pada jumlah banyak.
- Dalam memperoleh keamanan dan kepastian kredit lembaga perbankan akan bertindak dalam mengamankan calon nasabahnya supaya menjamin sebuah barang menjadi penjaminan saat memberi kredit yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHP
- Terhapusnya Hak Tanggungan perlu dilaksanakan dengan mencoret di Kantor Pertanahan yang mana Hak Tanggungan itu akan didaftar sehingga pihak ketiganya akan tahu jika Hak Tanggungan tersebut telah dihapuskan atau biasa disebut dengan roya

# CASE

- Pada Februari 2005 saudara EP meminjam pada bank BUMN, Unit Usaha Syariah Bank A. lalu Unit Usaha Syariah Bank Ada proses spin off, yaitu melakukan pemisahan diri dari induknya menjadi Bank B. di Februari 2020 saudara EP hendak melakukan proses roya tetapi proses yang dilalui harus berganti nama terlebih dahulu dengan melampirkan akta rups rencana spin off untuk selanjutnya dapat dilakukan proses roya di kantor pertahanan.namun yang di hadapi dilapangan pihak Bank tidak dapat memberikan dokumen yang diwajibkan oleh kantor pertahanan yaitu akta rups rencana spin off.
- Dalam kasus yang peneliti hadapi pihak Bank hanya meminta untuk melapor ke kantor pertahanan jika Unit Usaha Syariah Bank A telah spin off menjadi bank B, tanpa memberikan dokumen akta rups rencana spin off dalam pemisahan badan usaha.

# Rumusan Masalah

Bagaimana Akibat Hukum Pada Proses Royalty Terhadap Bank Yang Melakukan Corporate Action?

# Metode

- Metode penelitian yuridis normative
- Pendekatan dalam perundang-undangan atau yang dapat disebut dengan statue approach.
- Dengan menggunakan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis yang menghubungkan pasal satu dengan lainnya. Dalam hal ini penafsiran pada undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 dan Undang-undang Otoritas jasa keuangan No.21 tahun 2011.
- Analisis yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan penalaran deduktif

# PEMBAHASAN

- Kantor Pendaftaran Tanah membatalkan pendaftaran Roya pada Akta Tanah Debitur dan Pendaftaran Tanah, sehingga membatalkan hak tanggungan. Setelah Roya, akta kepemilikan tanah dikembalikan kepada debitur, tetapi akta hipotek disita oleh pemerintah negara bagian dan dibatalkan seperti akta hipotek yang dibatalkan. Khusus bagi kreditur bank yang dipisah karena pelaksanaan penghapusan hak tanggungan (loyalitas), Namun dalam praktiknya, jika krediturnya adalah bank hasil spin-off, tidak hanya diperlukan surat roya, tetapi juga dokumen tambahan berupa riwayat spin-off kreditur lama (bank split).
- Akibat hukum Proses Roya Terhadap Bank Yang Melakukan Corporate Action. bank tersebut harus mengganti atas kerugian yang nasabah terima hal ini sebagai akibat hukum yang menyebabkan hak debitur telah dilanggar karena ada itikad tidak baik dari Bank dan menyebabkan kerugian terhadap debitur tidak bias melakukan roya karna terhambat dokumen yang tidak diberikan oleh kreditur.

# LANJUTAN...

- akibat hukum pada proses roya terhadap Bank yang melakukan Corporate Action yaitu mengakibatkan adanya perubahan suatu aturan pada proses roya yaitu diperlukan dokumen-dokumen pendukung surat roya dari bank yang sifatnya wajib dari pihak BPN dan hal ini tidak bisa di penuhi terhadap Bank yang melakukan Corporate Action dalam pembahasan penelitian ini yaitu Spin Off, ketika nasabah dirugikan atas Corporate Action atau Spin Off bank tersebut.

# KESIMPULAN

Proses roya terhadap Bank yang melakukan Corporate Action yaitu mengakibatkan adanya perubahan suatu aturan pada proses roya yaitu diperlukan dokumen-dokumen pendukung surat roya dari bank yang sifatnya wajib dari pihak BPN untuk proses ganti nama agar setelahnya dapat di lakukanya proses roya dan hal ini tidak bisa di penuhi terhadap Bank yang melakukan Corporate Action dalam Spin Off

